

TERAPKAN SISTEM 'PRIORITY VEHICLE'

Armada Kedaruratan Miliki Akses Lebih Cepat

YOGYA (KR) - Armada kegawatdaruratan di Kota Yogya kini memiliki akses yang lebih cepat di jalan raya. Terutama seiring diterapkannya sistem 'priority vehicle' oleh Dinas Perhubungan Kota Yogya. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memberikan akses jalan bagi kendaraan gawat darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nograho, mengatakan sistem tersebut merupakan prioritas kendaraan yang terdiri dari rangkaian perangkat atau alat yang ditempatkan di kendaraan dan disimpan pada komponen Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Secara otomatis APILL akan memberikan respons cepat terhadap prioritas pada kendaraan ketika melewati simpang. "Dengan menggunakan alat priority vehicle, kendaraan kegawatdaruratan ketika akan melewati simpang maka APILL akan berubah menjadi nyala hijau, sehingga kendaraan kegawatdaruratan dapat melaju tanpa hambatan," urainya, Kamis (10/11).

Sebaliknya jika ada kendaraan kegawatdaruratan seperti ambulans dan pemadam kebakaran secara otomatis sistem ini akan memberikan simbol dalam jarak 300-350 meter prioritas lampu akan merah. Sehingga kendaraan kegawatdaruratan tidak harus antri dan tidak menyebabkan kemacetan saat melintas.

Dalam hal ini Dishub Kota Yogya sudah memasang dan melakukan uji coba sistem priority vehicle di simpang Wirobrajan. Nilai investasi untuk setiap alat mencapai sekitar Rp 20 juta. "Ini akan terus kita kembangkan di seluruh APILL di Kota Yogya terutama di titik-titik mana saja yang sering terjadi kemacetan, sehingga layanan

kegawatdaruratan akan semakin baik," imbuh Agus.

Agus menambahkan, penggunaan alat priority vehicle akan lebih optimal lagi jika diikuti dengan rekayasa lalu lintas perbaikan simpang. Terutama pada simpang-simpang yang kondisi struktur fisik geometri simpangnya tidak ideal sehingga menghambat manuver gerak kendaraan.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi berharap dengan sistem tersebut dapat memberitahu masyarakat untuk memberikan akses jalan bagi ambulans ataupun pemadam kebakaran yang sedang melintas dalam keadaan darurat. Penerapan sistem itu pun harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya tidak bingung dengan aturan yang baru sehingga mampu memberikan dukungan. "Dengan sistem ini bisa mempercepat kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans untuk bisa melaksanakan penyelamatan masyarakat yang lebih baik," jelasnya. (Dhi)-f

PENGUMPULAN ZIS OKTOBER RP 1,1 M

Belum Semua Instansi di DIY Bentuk UPZ

YOGYA (KR) - Para ASN muslim yang gaji dan pendapatan lainnya sudah mencapai nisab (minimal Rp 6,5 juta/bulan) diingatkan untuk membayar zakat. Pembayaran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi masing-masing. Karena itu semua instansi dan OPD diimbau membentuk UPZ sesuai surat edaran Gubernur DIY nomor 1 Tahun 2022 tentang imbauan menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Bansos di lingkungan Pemda DIY.

"Kenyataannya, belum semua OPD membentuk UPZ," kata Waka 4 Baznas DIY Ahmad Lutfi usai menyampaikan laporan pengelolaan ZIS-DSKL Baznas DIY pada pengajian pejabat dan aparat Pemda DIY, yang dilaksanakan secara virtual,



Ahmad Lutfi

KR-Istimewa

Kamis (10/11).

Dalam laporannya, Ahmad Lutfi menyampaikan, setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Baznas DIY selalu mengalami pertumbuhan signifikan. Perolehan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) selalu meningkat, sehingga jumlah penerima manfaatnya juga semakin banyak.

Mengenai perolehan ZIS-DSKL selama Oktober bulan lalu dilaporkan totalnya mencapai Rp 1.114.267.969. Untuk penghimpunan dalam neraca (on balance sheet) terkumpul Rp 1.064.354.369. Rinciannya, jumlah Zakat Rp 276.173.965, jumlah Infak Rp 33.444.451, dan jumlah infak Terikat Rp 754.735.953. Sedang di luar neraca (off balance sheet)) Rp 49.913.000 dengan rincian infak Masjid Kampus UGM Rp 37.802.100, infak Masjid Sulthoni Kepatihan Rp 8.626.000, infak Masjid BBKPP Rp 1.104.500. Untuk penyaluran, selama Oktober lalu berdasarkan program tersalur Rp 755.936.165 dan Berdasarkan Asnaf sebesar Rp 797.031.951. Jumlah penerima manfaat sebanyak 1.140 jiwa. (Feb)-f

MAKSIMAL KEBERADAAN DESA WISATA

Perlu Pemetaan Potensi dan Kearifan Lokal

YOGYA (KR) - Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada beberapa desa wisata di DIY, patut disyukuri dan apresiasi. Kondisi tersebut (pemberian penghargaan) secara tidak langsung menjadi angin segar bagi industri pariwisata di Yogyakarta. Karena hal itu merupakan bentuk pengakuan terhadap pengelolaan desa wisata di DIY yang telah dikelola dengan baik.

"Desa wisata yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik secara ekonomi, kelestarian budaya dan peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal. Hanya saja belum semua pengelolaan destinasi wisata menyadari akan hal itu," kata pengamat Pariwisata dari Akademi Stipary Yogyakarta, Suharto MPAr di

Yogyakarta, Kamis (10/11).

Menurut Suharto, bagi desa wisata yang selama ini pengelolaannya belum optimal, dengan penghargaan tersebut, diharapkan dapat dijadikan momentum bagi pengelola desa wisata untuk mengelola lebih maksimal lagi. Dengan begitu desa wisata yang dikelola memiliki daya tarik, daya saing dan berkelanjutan.

Tentunya semua itu akan bisa terwujud, apabila pemerintah dan pengelola desa wisata memetakan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing desa wisata. Sehingga dengan pemetaan tersebut, masing-masing desa wisata memiliki potensi unggulan dengan kearifan lokal yang berbeda-beda. Dengan beragamnya potensi unggulan yang ditawarkan di setiap desa wisata, maka hal tersebut diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk

berkunjung ke desa wisata yang ada di DIY.

"Selain beberapa hal di atas, para pengelola perlu memastikan kesiapan fasilitas pendukung di desa wisata seperti jaringan komunikasi, ketersediaan air bersih, rumah makan, homestay, pusat informasi, sarana prokes. Yang tak kalah penting adalah memastikan kesiapan masyarakat sekitar dalam menerima kunjungan wisatawan," paparnya.

Suharto menyatakan, apabila fasilitas pendukung tersebut bisa dipenuhi dengan baik, desa wisata yang ada di Yogyakarta akan siap menjadi alternatif pilihan bagi wisatawan untuk menyambut libur akhir tahun. Karena seperti yang kita ketahui, setiap musim libur akhir tahun, wisatawan yang datang ke Yogyakarta selalu mengalami peningkatan cukup signifikan. (Ria)-f

Gandung Tolak Cabut Tap MPRS XXV dan Tolak Minta Maaf ke PKI

YOGYA (KR)- Bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM mengajak semua komponen bangsa memahami sejarah perjalanan bangsa. Dengan demikian, pemahaman atas sejarah berlangsung lengkap dan utuh.

Gandung Pardiman selaku Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) bersama anggota Gepako DIY



"Setiap anak bangsa wajib memahami sejarah secara paripurna sehingga sejarah adalah sejarah yang tidak bisa diputarbalikan," tegas Gandung kemarin (10/11).

Pernyataan Gandung ini disampaikan sebagai respons atas munculnya desakan kepada pemerintah meminta maaf kepada

Presiden pertama RI Soekarno dan keluarganya. Desakan agar negara meminta maaf itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Gandung termasuk yang bersuara kritis soal tersebut. Dia menilai permintaan maaf itu sudah tidak diperlukan. Masih banyak urusan bangsa yang lebih urgen dibandingkan masalah tersebut. Pria yang

juga menjabat Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) menolak penghapusan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI. Tap MPRS tersebut juga melarang setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"Golkar DIY menolak penghapusan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dan menolak meminta maaf kepada PKI," tegasnya. Kembali soal pemahaman sejarah, Gandung mengajak para sejarawan tidak diam membisu melihat dinamika bangsa akhir-akhir ini. Dia meminta para sejarawan bicara secara terbuka soal sejarah pengkhianatan PKI terhadap NKRI. Jangan

sampai muncul upaya memutarbalikan fakta. Anggota Komisi VII



Gandung Pardiman

DPR RI itu mengaku tidak habis pikir dengan perkembangan dewasa ini. Ancaman bangkitnya PKI bukan isapan jempol. Gejala atau tanda-tanda itu makin nyata muncul di permukaan. Dia kembali mengajak semua anak bangsa tidak bersikap diam. Jika sikap diam itu terus dipelihara, ancaman mengubah Pancasila sangat terbuka terjadi.

"Ini masalah ideologi. Tidak ada tawar menawar dengan ideologi. Pancasila dalam posisi terancam, kita jangan hanya diam," serunya.

Gandung juga me ngajak TNI

/Polri bersikap tegas menghadapi ancaman bangkitnya komunisme. TNI/Polri merupakan pilar utama bangsa dalam mengawal dan menjaga Pancasila. "TNI/Polri jangan sampai ringkih," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Gandung menegaskan, masyarakat perlu dan terus mengingat jasa besar Presiden kedua RI Soeharto. Berkat Pak Harto, bangsa Indonesia selamat dari ancaman komunisme. Sikap Panglima Kostrad pertama dalam melawan dan menumpas PKI patut diapresiasi. "Kita harus berterima kasih dengan Pak Harto," katanya.

Sebagai upaya memelihara dan menggelorakan sikap antikomunis, Gandung dalam waktu dekat bakal mengadakan konsolidasi khusus pada pertengahan November ini. Panglima Gepako berencana mengumpulkan berbagai elemen antikomunis di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Tengah dalam waktu dekat. Tujuannya memperkuat soliditas dalam rangka melawan bangkitnya pengaruh komunis.

"Gepako siap berada di garda terdepan. Kami ajak anak-anak muda bergabung. Konsolidasi khusus itu sebagai upaya kami merapatkan barisan," tegas pria asal Imogiri, Bantul ini. (*/adv)

Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM